



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

TIM MBKM

BUKU PEDOMAN
**PROGRAM MAGANG
MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA**

PRODI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN



BUKU PEDOMAN
MBKM MAGANG
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MUKLAWARMAN

Pengarah

Dekan Fakultas HUKUM Universitas MULAWARMAN
Kantor Penjaminan Mutu Universitas MULAWARMAN

Ketua Penyusun

.....

Anggota Tim Penyusun

ARISTYA WINDIANA PAMUNCAK,S.H.,M.H.

.....

KATA PENGANTAR

Buku panduan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan pada Program Studi Sarjana Hukum di Universitas Mulawarman dalam hal penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya untuk Bentuk Kegiatan Pembelajaran Magang. Buku ini mengikuti Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2020, dan disesuaikan dengan Kurikulum Prodi Sarjana Hukum. Melalui buku panduan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi dosen, tenaga Pendidikan, mahasiswa di lingkungan Prodi Sarjana Hukum serta mitra program studi ataupun Universitas Mulawarman dan pihak yang terkait. Diharapkan seluruh civitas akademikan pada Prodi Sarjana Hukum dapat mengikuti dan memanfaatkan program ini secara optimal.

Buku ini disusun bersama dengan dosen-dosen program studi yang tergabung dalam tim pengembangan Program MBKM, serta masukan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan Fakultas, Kantor Penjaminan Mutu, Biro Administrasi Akademik dan Biro Teknologi Informasi di Universitas Mulawarman. Selanjutnya, buku ini dapat dipergunakan untuk panduan implementasi Magang MBKM, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi program.

Samarinda, 13 Oktober 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. KEGIATAN MAGANG.

A. DEFINISI

B. LINGKUP KEGIATAN

C. KETENTUAN UMUM

D. ALUR KEGIATAN MBKM MAGANG

E. BENTUK PELAKSANAAN MBKM MAGANG

F. ATURAN KONVERSI

G. PENILAIAN AKHIR DAN EVALUASI

H. MONITORING

BAB 3. PENUTUP

REFERENSI

Visi program studi Sarjana Hukum

Universitas Mulawarman menjadi rogram Studi Sarjana Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berciri khas sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan.

Misi Program Studi Sarjana Hukum

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang menguasai konsep teoritis ilmu hukum secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum

Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan praktek hukum

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan hukum.

Visi Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan.

Misi Fakultas Hukum

1. Menyelenggarakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu dan Berkualitas.
2. Menyelenggarakan Tata Kelola Fakultas yang Baik.
3. Membina dan Mengembangkan Potensi Mahasiswa.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), adalah kebijakan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) menawarkan beberapa program, yakni Magang Bersertifikat, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Kampus Mengajar, Studi Proyek Independen Bersertifikat, Proyek Kemanusiaan, Wirausaha, Penelitian/ Riset, dan Proyek di Desa . Kampus Merdeka tidak hanya berlaku untuk mahasiswa aktif namun juga berlaku untuk para dosen yang ingin terlibat sebagai Dosen Pembimbing Lapangan, Kegiatan Kampus Mengajar atau juga jika ada mahasiswa yang bertanya dan berkoordinasi dengan dosen sebagai PA terkait program - program MBKM. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan untuk membentuk mahasiswa agar memiliki pengalaman, dengan cara memberikan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* dalam bentuk keterampilan, *complex problem solving, analytical skills*, dsb. Selain itu juga mendapatkan ketrampilan *soft skills* dalam bentuk etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan dicetak lebih siap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Hal tersebut akan mengurangi kemungkinan permasalahan industri yang ditemui di perguruan tinggi sehingga meng-upgrade materi pembelajaran dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin berkembang. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra di antaranya yaitu perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan. Program Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman memberikan kesempatan dalam bentuk memfasilitasi kegiatan magang dalam proses pembelajaran mahasiswa melalui kurikulum MBKM.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Program MBKM, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil, ataupun

melakukan kegiatan MBKM selama maksimal 3 (tiga) semester yang diikuti dengan pengakuan maksimal 20 SKS mata kuliah.

Dalam kebijakannya, program MBKM merupakan pilihan bagi mahasiswa (yang telah memenuhi persyaratan tertentu) untuk menggunakan haknya mendapatkan pengalaman di luar Perguruan Tinggi, dan merupakan kewajiban bagi Fakultas Hukum untuk memfasilitasi terlaksananya kegiatan MBKM. Oleh karena itu, semua pihak yang terdiri dari Pimpinan Fakultas, Dosen Pengampu Mata Kuliah, Dosen Pembimbing Akademik, Tim MBKM serta dan Staf Kependidikan wajib berperan serta mendorong dan memfasilitasi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti program MBKM.

Mahasiswa yang memilih kegiatan MBKM berarti telah memilih pengganti aktivitas kuliah di kampus dengan kegiatan MBKM. Dengan demikian, segala akibat yang timbul berkaitan dengan kebutuhan hidup selama menjalani MBKM menjadi tanggung jawab mahasiswa. Namun demikian, pihak Fakultas akan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan magang MBKM sesuai dengan kebijakan anggaran yang ada. Sinergisme antara mahasiswa peserta MBKM, mitra MBKM dan pihak Fakultas akan menciptakan kesinambungan kegiatan yang berdampak pada pengembangan pola Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

B.Landasan Hukum

Dasar Hukum Pelaksanaan “Merdeka Belajar ” Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman merupakan salah satu implementasi kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No.17 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No.3935/SK/2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi Kurikulum di Universitas Mulawarman.

C. Tujuan

- Tujuan Umum
- Memperoleh pengalaman praktik yang nantinya akan berguna untuk pengembangan profesi dan percepatan dalam menyusun tugas akhir;
- Mengenalkan atmosfer dunia kerja;
- Memberikan ruang dan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktik;
- Menyiapkan mahasiswa untuk mengukur kompetensi diri dalam rangka mencapai ketrampilan/keahlian tertentu;
- Mendekatkan mahasiswa kepada Dunia Kerja.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari program MBKM ini adalah mahasiswa mampu memenuhi unsur capaian pembelajaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

NO	UNSUR CAPAIAN PEMBELAJARAN	DESKRIPSI
1	Sikap (Attitude)	Mampu bekerjasama dan menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya
		Menjaga etika dan berperilaku yang baik, sopan, dan jujur
		Meningkatkan semangat kemandirian, dan percaya diri
2	Keterampilan Umum (General Skills)	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan mitra MBKM, kolega, sejawat dan jaringan profesional
		Mampu mengukur kompetensi diri dalam rangka mencapai Keterampilan / keahlian tertentu di bidang hukum
		Mampu mengelola pembelajaran secara aktif dan mandiri
3	Ketrampilan Khusus (Specific Skills)	Mampu berkomunikasi dan mampu mengaktualisasi diri untuk membangun teamwork di bidang hukum dengan baik
		Mampu memecahkan persoalan hukum dan Menyusun dokumen-dokumen hukum yang ada
		Memiliki kemampuan menerapkan ilmunya di bidang hukum dalam praktik
		Memahami proses dan bidang kerja yang ada di lokasi dilaksanakannya MBKM
4	Pengetahuan (Knowledge)	Mampu menerapkan pengetahuan dan keilmuan hukum
		Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan hukum

BAB II

KEGIATAN MAGANG

A. Definisi

Magang bersertifikat adalah bagian dari program kampus merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan. Program magang 1-2 semester, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). disisi yang lain industri mendapatkan sumberdaya yang memiliki talenta yang relevan bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi.

Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

B. Lingkup Kegiatan

1. Kegiatan Magang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi selama 1 semester, dengan pengakuan dan konversi sesuai pedoman MBKM.
2. Magang di laksanakan pada mitra MBKM yaitu perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, BUMN, perusahaan rintisan (startup) dan Professional, yang sudah menandatangani MOU dengan Universitas Mulawarman atau Surat Perjanjian Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
3. pekerjaan yang diikuti mahasiswa magang harus relevan dengan bidang ilmu Hukum.

C. Ketentuan Umum

1. Perguruan Tinggi

Dalam melaksanakan Magang MBKM, Universitas Mulawarman perlu memenuhi hal berikut:

- a. Telah bekerjasama dengan Mitra Magang MBKM, dalam bentuk MOU
- b. Perguruan tinggi menyusun Pedoman Penyelenggaraan Magang MBKM, termasuk mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama melakukan aktivitas magang.
- c. Melaporkan hasil kegiatan Magang MBKM ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2. Fakultas

Dalam melaksanakan Magang, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman perlu memenuhi hal berikut:

- a. Telah bekerjasama dengan mitra magang MBKM, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- b. Fakultas menyusun Pedoman Akademik MBKM dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama dalam kegiatan magang.
- c. Melaporkan hasil magang MBKM ke Universitas Mulawarman.

3. Program Studi

Dalam melaksanakan Magang, Program Studi Sarjana Hukum, perlu memenuhi hal berikut:

- a. Menyepakati kerjasama dengan mitra magang dalam bentuk IA (Implementation of Arrangement).
- b. Menyusun Pedoman dan Magang MBKM dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama dalam kegiatan magang.
- c. Mensosialisasikan program Magang MBKM kepada mahasiswa.
- d. Melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang mendaftar program ini.

- e. Memberikan surat rekomendasi/ persetujuan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
- f. Menugaskan dosen pembimbing untuk program ini.
- g. Melaporkan hasil kegiatan ke Fakultas.

4. Mahasiswa

Adapun persyaratan bagi mahasiswa yang akan melakukan Kegiatan MBKM berupa :

- a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti);
- b. Minimal mahasiswa semester 5;
- c. Telah menempuh mata kuliah minimal 80 SKS;
- d. Memiliki IPK minimal 3,0;
- e. Bersedia menandatangani tata tertib dan kewajiban peserta MBKM;
- f. Mendapat persetujuan dari orang tua atau wali;
- g. Membuat proposal kegiatan MBKM yang ingin di ikuti;
- h. Kegiatan MBKM yang diikuti merupakan program yang diadakan oleh pemerintah atau instansi yang sudah memiliki MOU dengan Universitas
- i. Jenis mata Kegiatan yang diambil harus memenuhi ketentuan CPMK Prodi
- j. Mendapat ijin dari Kaprodi
- k. Mendapat rekomendasi dari Universitas
- l. Jumlah sks maksimal yang dapat dikonversi 20 SKS
- m. Menyetujui bahwa kegiatan MBKM yang dapat dikonversi adalah sejumlah SKS yang sesuai dengan CPL Mata Kuliah dan/atau jumlah jam magang dan di setujui oleh Prodi
- n. Agar dapat muncul di KHS, maka mata kuliah hasil konversi Kegiatan MBKM harus di masukkan dalam KRS, baik semester berjalan maupun semester berikutnya (membayar SPP)
- o. Mahasiswa wajib menyerahkan laporan kegiatan MBKM sebagai dasar konversi Mata Kuliah. Format laporan terlampir.

5. Dosen Pembimbing

- a. Dosen dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang sudah memiliki NIDN di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI
- b. Dosen Pembimbing adalah dosen yang diberi SK Dekan untuk melakukan pembimbingan Program MBKM
- c. Dosen Pembimbing memahami Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan

6. Persyaratan Mitra

- a. Mitra ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan kesepakatan kerja sama antara Universitas Mulawarman dengan instansi atau mitra MBKM.
- b. Mitra adalah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, BUMN, perusahaan rintisan (startup) dan Professional.
- c. Bersedia Bersama-sama dengan Prodi Sarjana Hukum menyusun form logbook
- d. Mitra harus menyediakan pembimbing mahasiswa program MBKM

D. Alur Kegiatan MBKM Magang

Kegiatan MBKM dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Pra KRS

- a. Mahasiswa mengusulkan kegiatan MBKM magang/kerja praktek melalui Rencana Learning Agreement
- b. Rencana Learning Agreement disusun bersama dengan dosen PA
- c. Seleksi di Program Studi dan atau Mitra (program studi/mitra)
- d. Prodi menyiapkan Surat Rekomendasi bagi mahasiswa yang mengikuti (Ka.Prodi)

2. Pengisian KRS (Mahasiswa)

- a. Mahasiswa memilih Jenis Kegiatan MBKM yang diikuti, Magang/Kerja Praktek dan Skema nya pada <https://fh.unmul.ac.id/mbkm/magang>
 - b. Mahasiswa mengunggah Surat Rekomendasi/ Surat Penerimaan dari tempat magang dan Rencana Learning Agreement pada <https://fh.unmul.ac.id/mbkm/magang>
 - c. Validasi oleh Dosen PA/ Ka.Prodi
 - d. Fakultas menyediakan surat tugas/SK untuk pelaksanaan kegiatan ini
3. Pelaksanaan Magang/Kerja Praktek
- a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian (Prodi)
 - b. Penerbitan Sertifikat (mitra PT)
 - c. Konversi nilai dan pengakuan sks (Prodi)
 - d. Input Nilai pada Siakad dan
 - e. Pelaporan PDDikti (Biro Administrasi Pembelajaran)

E. Bentuk Pelaksanaan MBKM Magang

Program Praktik Kerja merupakan salah satu pilihan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan di luar kampus. Mahasiswa dapat mengikuti Praktik Kerja di lembaga (BUMN, perusahaan swasta, instansi pemerintah dan lain-lain) yang disyaratkan masing-masing Program Studi.

Dalam mendukung program magang tersebut, maka Program Studi menyiapkan:

1. Mata kuliah konversi untuk kegiatan magang
2. Menyusun panduan pelaksanaan magang
3. Komitmen kerjasama dengan mitra
4. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melakukan magang

Selama kegiatan magang berlangsung mahasiswa magang memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mengisi buku kegiatan (logbook)

2. Mematuhi regulasi magang sesuai dengan perjanjian kerjasama
3. Mengikuti kegiatan magang sampai selesai atau maksimal 6 bulan
4. Melakukan koordinasi dengan Dosen Pendamping maupun supervisor
5. Mematuhi tata tertib yang berlaku di tempat magang
6. Menjaga nama baik Program Studi dan nama baik perusahaan/intansi tempat magang
7. Setelah kegiatan magang selesai mahasiswa magang berhak memperoleh sertifikat dan konversi/pengkuan nilai.

Selanjutnya mekanisme teknik kegiatan magang diatur dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Pra Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Magang.

F. Aturan Konversi

Kegiatan Magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa akan memperoleh pengakuan dalam bentuk mata kuliah (structured form) maupun skill atau kompetensi yang didapat selama mengikuti kegiatan MBKM- perpaduan antara rekognisi mata kuliah dan kompetensi ini disebut sebagai blended form. Secara lengkap pengakuan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Magang juga akan tercantum dalam SKPI. Mata kuliah dan kompetensi yang diakui setara sejumlah 20 sks, jika mahasiswa mengikuti kegiatan sampai dengan waktu 6 bulan atau setara dengan 840 jam (secara kumulatif). Namun, mata kuliah dan kompetensi yang direkognisi juga perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi. CPL untuk BKP Magang MBKM, yaitu :

No	SKS	Total jam/smt
1	1	2380
2	2	4760
3	3	7140
4	4	9520
5	5	11900
6	6	14280
7	7	16660
8	8	19040
9	9	21420
10	10	23800
11	11	26180
12	12	18560
13	13	30940
14	14	33320
15	15	35700
16	16	38080
17	17	40460
18	18	42840
19	19	45220
20	20	59840

Atau Hybrid, penggabungan antara Durasi Magang dan CPL yang diperoleh selama magang disesuaikan dengan CPL mata kuliah yang akan dikonversi:

NO	JUMLAH KONVERSI SKS	SYARAT
1	Maksimal 20 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan MBKM 2. Laporan dalam bentuk Video 3. Kegiatan dilaksanakan penuh 6 bulan 4. Memenuhi CPL
2	Maksimal 16 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan MBKM 2. Laporan dalam bentuk Video 3. Kegiatan dilaksanakan penuh 5 bulan 4. Memenuhi CPL
3	Maksimal 14 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan MBKM 2. Laporan dalam bentuk Video 3. Kegiatan dilaksanakan penuh 4 bulan 4. Memenuhi CPL
4	Maksimal 12 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan MBKM 2. Laporan dalam bentuk Video 3. Kegiatan dilaksanakan penuh 3 bulan 4. Memenuhi CPL
5	Maksimal 6 SKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan MBKM 2. Laporan dalam bentuk Video 3. Kegiatan dilaksanakan penuh 2 bulan 4. Memenuhi CPL

6	Maksimal 4 SKS	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan pelaksanaan MBKM2. Laporan dalam bentuk Video3. Kegiatan dilaksanakan penuh 1 bulan4. Memenuhi CPL5. Beban kerja/tugas yang diperhitungkan maksimal 4 jam dalam 1 hari.
---	----------------	--

Mata Kuliah yang dapat di konversi

Mata KUIAH yang dapat dikonversi bisa dilihat pada Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 3944/SK/2020 Tentang Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (terlampir)

G. PENILAIAN AKHIR DAN EVALUASI

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan MBKM. Evaluasi ini dilakukan oleh pembimbing MBKM dan oleh Mitra MBKM. Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM, baik dalam bentuk hard skills, maupun soft skills sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Setiap aktivitas akademik di Universitas Mulawarman selalu dilakukan evaluasi ketercapaian kompetensi yang diharapkan. Evaluasi dan penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping yang telah ditunjuk.

1. Bobot Penilaian

Bobot penilaian Magang/Praktik Kerja dengan komponen berikut ini.

Tabel . Bobot Penilaian Magang/Praktik Kerja

NO	KOMPONEN	BOBOT
1	Proses dan Kinerja Magang/Praktik Kerja	40%
2	Penulisan Laporan	20%
3	Artikel	20%
4	Video	20%

2. Ketentuan umum penilaian

- a. Proses dan Kinerja pelaksanaan Magang/Praktik Kerja, penulisan laporan, artikel, dan video Magang/Praktik Kerja dinilai oleh dosen pembimbing.
- b. Penilaian mengacu kepada format dan kriteria penilaian yang ditetapkan.

- c. Hasil penilaian dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ada dan diserahkan pada program studi
- d. Penilaian dilakukan dengan adil dan objektif.

3. Penilaian Prestasi Kinerja

Dalam melakukan kegiatan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa akan memperoleh penilaian dari dosen pembimbing dengan butir penilaian Proses dan prestasi kinerja Magang/Praktik Kerja. Adapun butir-butir yang dinilai sebagai prestasi kerja diuraikan sebagai berikut.

a. Kompetensi Bidang Kegiatan:

- 1) Penguasaan Bidang Kegiatan
- 2) Perencanaan Kegiatan
- 3) Pelaksanaan Kegiatan
- 4) Evaluasi dan Tindak Lanjut

b. Sikap dan Perilaku:

- 1) inisiatif
- 2) kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan),
- 3) disiplin
- 4) penampilan
- 5) ketekunan
- 6) kemampuan teknikal
- 7) berpikir kritis, kreatif dan analitis
- 8) kemampuan bekerjasama dalam tim
- 9) kemampuan beradaptasi
- 10) hasil pekerjaan (kontribusi)

c. Penilaian Penulisan Laporan

1) Berikut adalah ketentuan umum mengenai Laporan Magang/Praktik Kerja.

- a) Pada akhir pelaksanaan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan menulis Laporan Magang/Praktik Kerja.
- b) Pedoman penulisan Laporan Magang/Praktik Kerja dapat ditemukan pada Bab 6 dari buku pedoman ini.
- c) Laporan Magang/Praktik Kerja harus disetujui oleh dosen pembimbing Magang/Praktik Kerja.
- d) Laporan Magang/Praktik Kerja harus diselesaikan segera setelah hari terakhir Program Magang/Praktik Kerja.
- e) Dalam penyusunan Laporan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa wajib menaati ketentuan kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan oleh Dosen Pembimbing.

2) Penilaian terhadap penulisan laporan Magang/Praktik Kerja yang dibuat mahasiswa mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Deskripsi proses kegiatan Magang/Praktik Kerja yang dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan:
 - i. Gambaran umum mitra Magang/Praktik Kerja
 - ii. Tugas mahasiswa selama Magang/Praktik Kerja dijelaskan dengan baik
- b) Kelengkapan substansi laporan. Aspek ini berkaitan dengan:
 - i. Argumentasi/alasan dari kegiatan yang dilaksanakan serta urgensinya ditulis secara jelas di latar belakang;
 - ii. Mitra Magang/Praktik Kerja digambarkan secara detil dan lengkap;
 - iii. Metode pelaksanaan tepat dan relevan;

- iv. Program-program yang dilaksanakan, hasil program yang dilaksanakan, tantangan yang ditemui, termasuk temuan-temuan baru selama pelaksanaan kegiatan, maupun uraian keberlanjutan program telah dijelaskan;
- v. Kesimpulan dirumuskan sesuai dengan pelaksanaan Magang/Praktik Kerja;
- vi. Refleksi diri mencerminkan proses pembelajaran selama Magang/Praktik Kerja.

3) Kesesuaian format laporan. Aspek ini berkaitan dengan:

- a) Mengikuti panduan laporan Magang/Praktik Kerja;
- b) Logika penyajian yang runtut, dan
- c) Bahasa yang baku serta ilmiah.

4) Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa peserta Magang/Praktik Kerja sebelum penilaian laporan akhir adalah:

- a) laporan harus ditandatangani oleh dosen pembimbing;
- b) laporan harus segera diselesaikan paling lambat dua minggu setelah program berakhir; dan
- c) dalam penyusunan laporan, mahasiswa wajib menaati ketentuan kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan mitra.

d. Penilaian Video

Butir penilaian Video Laporan Magang/Praktik Kerja mencakup aspek berikut ini.

- 1) Efektifitas setting cerita yang dipaparkan (memuat bagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama Magang/Praktik Kerja)
- 2) Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan mengalir/terdapat hubungan antar 'adegan')
- 3) Konten (subjek dalam video diperkenalkan atau dijelaskan)

- 4) Kualitas gambar dan suara

H. MONITORING

Monitoring online sebagai salah satu bagian dari evaluasi pelaksanaan kegiatan, dengan mengisi kuisioner tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Adapun Prosedur pemberian skor yang diberikan kepada mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kegiatan merdeka belajar, mengikuti pedoman penskoran penilaian yang tertera pada peraturan akademik Universitas Mulawarman

BAB III

PENUTUP

Buku petunjuk teknis ini diterbitkan dengan tujuan menjadi panduan penyelenggaraan MBKM, khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran Magang/Praktik Kerja. Melalui panduan ini diharapkan Prodi Sarjana Hukum dapat menyelenggarakan program MBKM secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Buku panduan ini merupakan panduan dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.

Buku panduan ini disusun dengan harapan semoga bermanfaat bagi Prodi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semoga dengan menerapkan pedoman ini Prodi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa serta menjaga kearifan lokal menuju *excellent for tropical studies*

REFERENSI

LP3M Unmul. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Mulawarman. Samarinda

LP3M. 2020. Panduan Implementasi Kurikulum Kampus Merdeka- Merdeka Belajar Berbasis Tropical Studies Universitas Mulawarman. Samarinda

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No.17 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

Keputusan Rektor Universitas Mulawarman NOMOR: 3935/SK/2020 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Implementasi Kurikulum Di Universitas Mulawarman

Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 3944/SK/2020 Tentang Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

LAMPIRAN

1. Infografis dan Alur Mengikuti Magang MBKM
2. Form Rencana Learning Agreement
3. Form surat pernyataan bersedia ditempatkan
4. Form Surat Ijin Orang Tua
5. Form LogBook
6. Form Capaian Pembelajaran
7. Form Presensi Magang
8. Form Laporan Kegiatan Magang
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 3944/SK/2020 Tentang Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman



MAGANG MBKM FH UNMUL

Magang MBKM adalah Bentuk Kegiatan Pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan riil di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA) yang dilaksanakan selama 1 semester (setara 20 SKS).

BENEFIT

1. **Uang saku & Akomodasi (Tergantung Program magang)**
2. **Professional Mentor**
3. **Training sesuai Job**
4. **Pengakuan 20 SKS dari KemendikbudRistek**
5. **Sertifikat magang Kampus Merdeka**
6. **Project yang jelas dan terarah**
7. **Pengalaman di dunia kerja**
8. **Relasi dan koneksi**

Kriteria Mahasiswa yang bisa mendaftar

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti);
2. Minimal _____ mahasiswa semester 5;
3. Telah _____ menempuh _____ mata kuliah minimal 80 SKS;
4. Memiliki IPK minimal 3,0;
5. Bersedia _____ berkomitmen magang selama 1 semester
6. Mendapat persetujuan dari orang tua atau wali;
7. tidak sedang mengikuti _____ program kampus merdeka yang lain

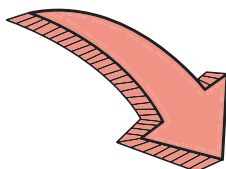
TUJUAN

1. Memperoleh pengalaman praktik yang nantinya akan berguna untuk pengembangan profesi dan percepatan dalam menyusun tugas akhir;
2. Mengenalkan atmosfer dunia kerja;
3. Memberikan ruang dan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktik;
4. Menyiapkan mahasiswa untuk mengukur kompetensi diri dalam rangka mencapai ketrampilan/keahlian tertentu;
5. Mendekatkan mahasiswa kepada Dunia Kerja.

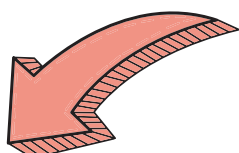


BAGAN ALUR MENGIKUTI MAGANG MBKM

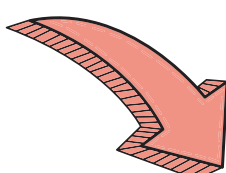
Mahasiswa Melihat informasi magang di Website <https://fh.unmul.ac.id/mbkm/magang>



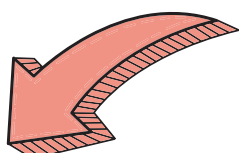
Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik tentang Rencana mengikuti magang MBKM & KRS yang diambil



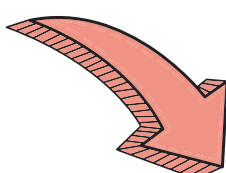
melakukan Pendaftaran melalui web Fh Unmul



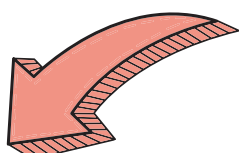
Prodi mengumumkan mahasiswa lolos seleksi, lokasi magang, dan pembimbing



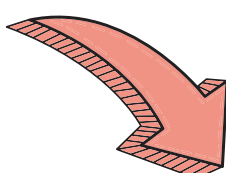
Fakultas mengeluarkan surat tugas/ Surat Rekomendasi kegiatan magang



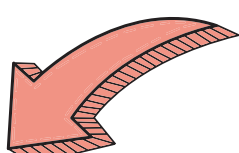
Mahasiswa melakukan KRS sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Fakultas



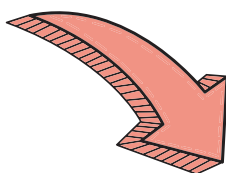
Dosen Pembimbing Akademik (DPA) menyetujui KRS Online



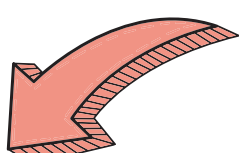
Pembekalan Magang oleh Prodi



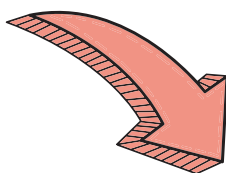
Mahasiswa melaksanakan Kegiatan Magang



Mahasiswa Mengisi Logbook selama magang



Selesai magang Mahasiswa mengupload laporan magang di web Fh Unmul dan melapor ke DPA



Konversi SKS dan Penilaian oleh Prodi

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN PADA MITRA UNIVERSITAS
PADA KEGIATAN MAGANG - MBKM**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Menyatakan bersedia ditempatkan pada mitra Universitas Mulawarman/ Fakultas Hukum selama.....bulan apabila dinyatakan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Mitra Universitas Mulawarman/ Fakultas Hukum - Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program (MBKM) Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda,

Yang menyatakan,

.....

NIM.....

SURAT IZIN ORANG TUA UNTUK MENGIKUTI PROGRAM MAGANG

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Selaku orang tua dari :

Nama :

NIM :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Tempat Magang :

Dengan ini kami selaku orang tua dari anak kami, menyetujui serta memberikan izin untuk mengikuti Program Magang MBKM tersebut, dan akan memberikan dukungan sepenuhnya serta bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Samarinda,2022

Orang Tua,

Materai 6000

(Nama)

LOGBOOK KEGIATAN MAGANG - MBKM

Judul kegiatan	:
Lama kegiatan	: bulan
Total jam kegiatan	: jam
Jumlah konversi SKS	: sks
Dosen pendamping	:

Minggu Ke – 1

No	Tanggal/Bulan	Deskripsi Tugas	Target	Prosentase Pencapaian

Catatan minggu ke 1

Kota ,2022.

Pembimbing Lapangan

Ttd dan stempel

Nama Lengkap

Form Capaian Pembelajaran

KURIKULUM KEGIATAN MAGANG

Judul kegiatan	:		
Lama kegiatan	: bulan		
Total jam kegiatan	: jam		
Jumlah konversi SKS	: sks		
Dosen pendamping	:		
No	Minggu Ke	Kegiatan Magang	Capaian Pembelajaran
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		

	Nama Kota,
Disetujui oleh, Dosen Pendamping 	Disusun oleh, Tanda tangan dan stempel

Format Laporan Kegiatan Magang

HALAMAN JUDUL (COVER LUAR, COVER DALAM)

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gambaran Tempat Magang dan alasan memilih lokasi (apa yang diharapkan mahasiswa dan apa keistimewaan lokasi magang)

B. Tujuan Magang

(Sesuai dengan tujuan di lokasi magang)

II. PROFIL LOKASI MAGANG

- Meliputi sejarah, lokasi, struktur organisasi (SDM), ruang lingkup usaha, aset, dan sebagainya

III. KEGIATAN MAGANG

A. Kegiatan Pokok

B. Kegiatan Tambahan

(Bab III merupakan reportase kegiatan yang sudah dilaksanakan, urut sesuai alur kegiatan, disertai pembahasan dan rekomendasi solusi atas permasalahan yang ada, serta sebutkan dan uraikan kegiatan pokok dan kegiatan tambahan apa saja yang dikerjakan di tempat magang dan total jumlah jam magang beserta rinciannya, setiap hari berapa jam, seminggu berapa hari kerja, selama berapa minggu)

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Selesai Magang/ sertifikat magang
2. LogBook
3. Form Capaian Pembelajaran
4. Presensi Magang

Format : A4, 1,5 spasi, Times New Roman 12, cover buffalo Merah tanpa plastic mika

Contoh Halaman Judul :

JUDUL



Disusun oleh :

Nama

NIM

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2022

Contoh Halaman Pengesahan

LAPORAN MAGANG
JUDUL

Oleh :
Nama
NIM.

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Magang
pada tanggal

Samarinda,

Dosen Pembimbing Magang

Pembimbing Lapangan Mitra

.....
NIK

.....
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
NIP. 198203072003121003



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 3944/SK/2020

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan hukum terkini, perubahan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pembelajaran pendidikan tinggi, dan perubahan capaian pembelajaran lulusan serta kebutuhan pengguna lulusan, perlu dilakukan evaluasi terhadap substansi dan struktur kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1263/SK/2017 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan secara sistematis dan terukur yang kemudian menyebabkan adanya pembaruan substansi dan struktur kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 09 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Kesatu : Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberlakukan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2020 dan seterusnya.
- Ketiga : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman selain sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, tetap mempergunakan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1263/SK/2017 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa Angkatan 2019.
- Keempat : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1263/SK/2017 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa Angkatan 2019.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Keenam : Bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2020
REKTOR,

Ttd.

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
MULAWARMAN
NOMOR 3944/SK/2020
TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
200801602W0001	Pengantar Hukum Indonesia <i>Introduction to Indonesia Law</i>	2	1	-	Inti	MKK
200801604W0002	Pengantar Ilmu Hukum <i>Introduction to Legal Science</i>	4	1	-	Inti	MKK
MU0000603W001	Pendidikan Agama Islam <i>Islam Study</i>	3	1	-	Inti	MPK
MU0000603W001	Pendidikan Agama Kristen Protestan <i>Christian Study</i>	3	1	-	Inti	MPK
MU0000603W001	Pendidikan Agama Katolik <i>Catholic Study</i>	3	1	-	Inti	MPK
MU0000603W001	Pendidikan Agama Budha <i>Budhism Study</i>	3	1	-	Inti	MPK
MU0000603W001	Pendidikan Agama Hindu <i>Hinduism Study</i>	3	1	-	Inti	MPK
MU0000603W001	Pendidikan Agama Kong Hu Cu <i>Kong Hu Cu Study</i>	3	1	-	Inti	MPK
MU0000603W002	Pendidikan Pancasila <i>Pancasila Education</i>	3	1	-	Inti	MPK
MU0000603W003	Pendidikan Kewarganegaraan <i>Civic Education</i>	3	1	-	Inti	MPK
MU0000603W004	Bahasa Indonesia <i>Indonesia Language</i>	3	1	-	Inti	MPK
200801602W0003	Ilmu Negara <i>The State Science</i>	2	1	-	Inti	MKK
200801604W0004	Hukum Administrasi Negara (HAN) <i>State Administration Law</i>	4	2	-	Inti	MKK
200801604W0005	Hukum Tata Negara (HTN) <i>Constitutional Law</i>	4	2	-	Inti	MKK
200801604W0006	Hukum Perdata <i>Private Law</i>	4	2	-	Inti	MKK
200801604W0007	Hukum Pidana <i>Criminal Law</i>	4	2	-	Inti	MKK
200801603W0008	Hukum Internasional (HI) <i>International Law</i>	3	2	-	Inti	MKK
200801602W0009	Bahasa Inggris Hukum	2	2	-	Inti	MBB

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
	<i>English for Special Purpose (Law)</i>					
200801602W0010	Hukum Konstitusi <i>Constitution Law</i>	2	3	HTN	Institusional	MKK
200801602W0011	Hukum Pemerintahan Daerah <i>Local Government Law</i>	2	3	HTN, HAN	Institusional	MKK
200801603W0012	Hukum Agraria <i>Agrarian Law</i>	3	3	HAN	Inti	MKK
200801604W0013	Hukum Dagang <i>Commercial Law</i>	4	3	H. Perdata	Inti	MKK
200801602W0014	Hukum Islam <i>Islamic Law</i>	2	3	PIH, PHI	Inti	MPK
200801602W0015	Antropologi Hukum <i>Anthropology of law</i>	2	3	PIH, PHI	Institusional	MBB
200801602W0016	Sosiologi Hukum <i>Sociology of Law</i>	2	3	PIH, PHI	Institusional	MBB
200801602W0017	Hukum Telematika <i>Telematics law</i>	2	3	H. Perdata, H. Pidana, HI	Institusional	MKK
MU0000603W005	Ilmu Kealaman Dasar <i>Basic of Natural Science</i>	3	3	-	Inti	MPK
200801602W0018	Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Law and Human Rights</i>	2	4	HTN, H. Pidana	Institusional	MKK
200801602W0019	Hukum Keuangan Negara <i>State Financial Law</i>	2	4	HAN	Institusional	MKK
200801603W0020	Hukum Pajak <i>Law of Tax</i>	3	4	HAN	Institusional	MKK
200801602W0021	Hukum Ketenagakerjaan <i>Labor Law</i>	2	4	H. Perdata, HAN	Institusional	MKK
200801602W0022	Hukum Adat <i>Customary Law</i>	2	4	PIH, PHI	Inti	MKK
200801603W0023	Hukum Lingkungan <i>Environment Law</i>	3	4	HAN	Inti	MKK
200801602W0024	Hukum Kekayaan Intelektual <i>Intellectual Property Law</i>	2	4	H. Perdata, H. Pidana, HI	Institusional	MKK
200801602W0025	Hukum Perniagaan Internasional <i>International Trade Law</i>	2	4	HI, H. Dagang	Institusional	MKK
200801603W0026	Perancangan Perundang-Undangan <i>Legislation Drafting</i>	3	4	HTN, HAN	Inti	MKB
200801604W0027	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara <i>Administrative Court</i>	4	5	HAN	Inti	MKB
200801604W0028	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata <i>Judicial Practice and Procedure of Private Law</i>	4	5	H. Perdata	Inti	MKB
200801604W0029	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana	4	5	H. Pidana	Inti	MKB

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
	<i>Judicial Practice and Procedure of Criminal Law</i>					
200801602W0030	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi <i>Law of Constitutional Court Procedure</i>	2	5	HTN, H. Konstitusi	Institusional	MKB
200801602W0031	Hukum Acara Peradilan Agama <i>Religion Judicial Procedure</i>	2	5	H. Islam	Institusional	MKB
200801603W0032	Perancangan Kontrak <i>Contract Drafting</i>	3	5	H. Perdata, H. Dagang, H. Perniagaan Internasional, Hukum Ketenagakerjaan	Inti	MKB
200801602W0033	Kewirausahaan <i>Entrepreneurship</i>	2	5	-	Inti	MKB
200801602W0034	Hukum Perlindungan Konsumen <i>Consumer Protection Law</i>	2	6	H. Perdata, H. Pidana	Institusional	MKK
200801602W0035	Hukum Perubahan Iklim <i>Climate Change Law</i>	2	6	H. Lingkungan	Institusional	MKK
200801602W0036	Pengantar Filsafat Hukum <i>Introduction to Philosophy of Law</i>	2	6	PIH, PHI, Hukum Perdata, Hukum Pidana, HAN, HTN, Hukum Internasional	Inti	MPB
200801602W0037	Penalaran Hukum <i>Legal Reasoning</i>	2	6	P PIH, PHI, Hukum Perdata, Hukum Pidana, HAN, HTN, Hukum Internasional	Institusional	MBB
200801602W0038	Metode Penelitian Hukum <i>Methods of Legal Research</i>	2	6	PIH, PHI, Hukum Perdata, Hukum Pidana, HAN, HTN, Hukum Internasional	Inti	MKB
MU0000603W007	Kuliah Kerja Nyata <i>Community Service Program/Internship</i>	3	6	Lulus 96 SKS	Institusional	MBB
200801602W0039	Hukum Kehutanan <i>Forestry Law</i>	2	7	H. Agraria, dan/atau H. Lingkungan	Institusional	MKK
200801602W0040	Hukum Pertambangan <i>Mining Law</i>	2	7	H. Agraria, dan/atau H. Lingkungan	Institusional	MKK
200801602W0041	Hukum Perlindungan Pesisir dan Laut <i>Coastal and Ocean Protection Law</i>	2	7	H. Agraria, dan/atau H. Lingkungan	Institusional	MKK
200801602W0042	Legal Audit <i>Legal Audit</i>	2	7	Penalaran Hukum	Institusional	MKB

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
200801602W0043	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum <i>Ethic Code and Responsibility of the Legal Profession</i>	2	7	PIH, PHI, Hukum Perdata, Hukum Pidana, HAN, HTN, Hukum Internasional	Inti	MPB
200801604W0044	Skripsi <i>Bachelor Thesis</i>	4	7	Lulus 120 SKS	Inti	MKB
200801602P0045	Hukum Perizinan <i>Law of Permit</i>	2	6	HAN	Institusional	MKK
200801602P0046	Hukum Administrasi Lingkungan <i>Environmental Administration Law</i>	2	6	HAN	Institusional	MKK
200801602P0047	Hukum dan Kebijakan Publik <i>Law and Public Policy</i>	2	6	HAN	Institusional	MKK
200801602P0048	Hukum Kewenangan dan Diskresi <i>Authority and Discretion Law</i>	2	6	HAN	Institusional	MKK
200801602P0049	Hukum Penataan Ruang <i>Law of Spatial Planning</i>	2	6	HAN	Institusional	MKK
200801602P0050	Aspek Hukum Kerja Sama Pemerintah <i>Legal Aspect of Government Cooperation</i>	2	7	HAN	Institusional	MKK
200801602P0051	Hukum Aparatur Negara <i>State Apparatus Law</i>	2	7	HAN	Institusional	MKK
200801602P0052	Perbandingan Hukum Administrasi Negara <i>Comparison of State Administration Law</i>	2	7	HAN	Institusional	MKK
200801602P0053	Hukum Keimigrasian <i>Immigration Law</i>	2	7	HAN	Institusional	MKK
200801602P0054	Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	2	6	HI, H. Pidana	Institusional	MKK
200801602P0055	Hukum Organisasi Internasional <i>International Organization of Law</i>	2	6	HI	Institusional	MKK
200801602P0056	Hukum Perdata Internasional <i>International Private Law</i>	2	6	HI, H. Perdata	Institusional	MKK
200801602P0057	Hukum Perjanjian Internasional <i>International Treaty Law</i>	2	6	HI, Hukum Perniagaan Internasional	Institusional	MKK
200801602P0058	Hukum Lingkungan Internasional <i>International Environmental Law</i>	2	6	HI, H. Lingkungan	Institusional	MKK
200801602P0059	Hukum Diplomatik dan Konsuler <i>Diplomatic and Counsellor Law</i>	2	7	HI	Institusional	MKK

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
200801602P0060	Hukum Humaniter <i>Humanitarian Law</i>	2	7	HI, Hukum dan HAM	Institusional	MKK
200801602P0061	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional <i>Dispute Settlement of International Law</i>	2	7	HI, H. Perjanjian Internasional	Institusional	MKK
200801602P0062	Hukum Kewilayahan Negara <i>State Territorial Law</i>	2	7	HI	Institusional	MKK
200801602P0063	Hubungan Antar Lembaga Negara <i>State Organs Relationship</i>	2	6	HTN	Institusional	MKK
200801602P0064	Negara Hukum dan demokrasi <i>State of law and democracy</i>	2	6	HTN	Institusional	MKK
200801602P0065	Hukum Lembaga Kepresidenan <i>Law of Presidential</i>	2	6	HTN	Institusional	MKK
200801602P0066	Hukum Lembaga Perwakilan Rakyat <i>Law of The House of Representative</i>	2	6	HTN	Institusional	MKK
200801602P0067	Hukum Pemerintahan Desa <i>Law of Village Government</i>	2	6	HTN	Institusional	MKK
200801602P0068	Hukum Pers <i>Journalism Law</i>	2	7	HTN	Institusional	MKK
200801602P0069	Hukum Pemilu <i>General Election Law</i>	2	7	HTN	Institusional	MKK
200801602P0070	Kekuasaan Kehakiman <i>Judge Authority</i>	2	7	HTN	Institusional	MKK
200801602P0071	Perbandingan Hukum Tata Negara <i>Comparison of Constitutional Law</i>	2	7	HTN	Institusional	MKK
200801602P0072	Hukum Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan <i>Banking and Monetary Institutional Law</i>	2	6	H. Perdata	Institusional	MKK
200801602P0073	Hukum Jaminan dan Penyelesaian Hutang <i>Security and Debt Settlement Law</i>	2	6	H. Perdata	Institusional	MKK
200801602P0074	Hukum Perusahaan <i>Corporate Law</i>	2	6	H. Perdata	Institusional	MKK
200801602P0075	Hukum Perjanjian dan Perkembangan Kontrak Komersial <i>Contract Law and Commercial Contract Development</i>	2	6	H. Perdata	Institusional	MKK
200801602P0076	Hukum Ekonomi Syariah <i>Sharia Economic Law</i>	2	6	H. Perdata	Institusional	MKK
200801602P0077	Hukum Investasi dan Pasar Modal <i>Investment and Capital Market Law</i>	2	7	H. Perdata	Institusional	MKK

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
200801602P0078	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha <i>Anti-Trust Law</i>	2	7	H. Dagang	Institusional	MKK
200801602P0079	Hukum Asuransi <i>Insurance Law</i>	2	7	H. Perdata	Institusional	MKK
200801602P0080	Hukum Keperdataan Adat <i>Customary Civil Law</i>	2	7	H. Adat	Institusional	MKK
200801602P0081	Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	2	6	H. Pidana, HI	Institusional	MKK
200801602P0082	Kriminologi <i>Criminology</i>	2	6	H. Pidana	Institusional	MKK
200801602P0083	Sistem Peradilan Pidana <i>Criminal Justice System</i>	2	6	H. Pidana	Institusional	MKK
200801602P0084	Tindak Pidana Di Luar KUHP <i>Crime Outside the Criminal Code</i>	2	6	H. Pidana	Institusional	MKK
200801602P0085	Kejahatan Sumber Daya Alam <i>Natural Resource Crime</i>	2	6	H. Pidana	Institusional	MKK
200801602P0086	Tindak Pidana Korupsi <i>Corruption Crime</i>	2	7	H. Pidana	Institusional	MKK
200801602P0087	Hukum Pidana Anak <i>Juvenile Criminal Law</i>	2	7	H. Pidana	Institusional	MKK
200801602P0088	Kejahatan Korporasi <i>Corporate Crime</i>	2	7	H. Pidana	Institusional	MKK
200801602P0089	Viktimologi <i>Victimology</i>	2	7		Institusional	MKK
200801602P0090	Sistem Penyelesaian Sengketa Berbasis Hukum Adat <i>Customary Law-Based Dispute Resolution System</i>	2	6	H. Adat, H. Pidana, H. Perdata	Institusional	MKK
200801602P0091	Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi <i>Corruption Court System</i>	2	6	H. Pidana, H.Acara dan Praktik Pidana	Institusional	MKK
200801602P0092	Alternatif Penyelesaian Sengketa <i>Alternative Dispute Resolution</i>	2	6	H. Pidana, H. Perdata, H.Acara dan Praktik Pidana, H. Acara dan Praktik Perdata	Institusional	MKK
200801602P0093	Sistem Peradilan Militer <i>Military Justice System</i>	2	6	H.Acara dan Praktik Pidana, H. Acara dan Praktik Perdata, H. Acara dan Praktik TUN	Institusional	MKK
200801602P0094	Sistem Peradilan Pajak <i>Tax Justice System</i>	2	6	H. Pajak H.Acara dan Praktik	Institusional	MKK

Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prasyarat	Kurikulum	Klasifikasi
				Pidana, H. Acara dan Praktik Perdata, H. Acara dan Praktik TUN		
200801602P0095	Sistem Peradilan Quasi Judisial <i>Quasi Judicial Justice System</i>	2	7	H.Acara dan Praktik Pidana, H. Acara dan Praktik Perdata, H. Acara dan Praktik TUN	Institusional	MKK
200801602P0096	Sistem Peradilan Perikanan dan Pelayaran <i>Fisheries and Maritime Justice System</i>	2	7	H.Acara dan Praktik Pidana, H. Acara dan Praktik Perdata, H. Acara dan Praktik TUN	Institusional	MKK
200801602P0097	Sistem Peradilan Niaga dan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual <i>Bankruptcy and Intellectual Property Rights Justice System</i>	2	7	HKI, H.Acara dan Praktik Pidana, H. Acara dan Praktik Perdata, H. Acara dan Praktik TUN	Institusional	MKK
200801602P0098	Sistem Peradilan Hubungan Industrial <i>Industrial Relations Justice System</i>	2	7	H Ketenagakerjaan, H. Acara dan Praktik Perdata	Institusional	MKK
-	Pertukaran Pelajar <i>Students Exchange</i>	Tranfer kredit penuh	Minimal Semester 3	Mengikuti Petunjuk Teknis MBKM	MBKM	Pembelajaran di dalam luar Program Studi
-	Magang/Praktik Industri <i>Internship</i>	59840 menit (Setara 20 SKS)	Minimal Semester 3	Mengikuti Petunjuk Teknis MBKM	MBKM	Pembelajaran di luar Program Studi
-	Penelitian/Riset <i>Research</i>	59841 menit (Setara 20 SKS)	Minimal Semester 3	Mengikuti Petunjuk Teknis MBKM	MBKM	Pembelajaran di luar Program Studi
-	Wirausaha <i>Enterpreneurship</i>	59842 menit (Setara 20 SKS)	Minimal Semester 3	Mengikuti Petunjuk Teknis MBKM	MBKM	Pembelajaran di luar Program Studi
-	Studi/Proyek Independen <i>Independent Project</i>	59843 menit (Setara 20 SKS)	Minimal Semester 3	Mengikuti Petunjuk Teknis MBKM	MBKM	Pembelajaran di luar Program Studi
-	Proyek di Desa <i>Project in The Village</i>	59844 menit (Setara 20 SKS)	Minimal Semester 3	Mengikuti Petunjuk Teknis MBKM	MBKM	Pembelajaran di luar Program Studi
-	Proyek Kemanusiaan <i>Humanity Project</i>	59845 menit (Setara 20 SKS)	Minimal Semester 3	Mengikuti Petunjuk Teknis MBKM	MBKM	Pembelajaran di luar Program Studi
-	Mengajar di Sekolah <i>School Teaching</i>	(Setara 20 SKS59846 menit)	Minimal Semester 3	Mengikuti Petunjuk Teknis MBKM	MBKM	Pembelajaran di luar Program Studi

Keterangan Akronim:

MPK = Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

MKK = Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan

MKB = Mata Kuliah Keahlian Berkarya

MPB = Mata Kuliah Perilaku Berkarya

MBB = Mata Kuliah Berkehidupan Bersama

MBKM = Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Ttd.

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
MULAWARMAN
NOMOR 3944/SK/2020
TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DESKRIPSI MATA KULIAH
KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
Pengantar Hukum Indonesia <i>Introduction to Indonesia Law</i>	Mata kuliah ini menjelaskan pengertian hukum positif dalam hubungannya dengan Tata Hukum (Indonesia), sejarah Tata Hukum di Indonesia, sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dunia, asas-asas hukum di Indonesia (hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Acara).
Pengantar Ilmu Hukum <i>Introduction to Legal Science</i>	Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar pengetahuan hukum secara umum sebagai landasan untuk mempelajari bidang-bidang hukum di tingkat selanjutnya. Untuk itu dalam mata kuliah ini dibahas dasar-dasar hukum seperti hubungan hukum dengan masyarakat, arti tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Sumber-sumber hukum, konsep hukum penggolongan hukum, tentang hak dan kewajiban, penemuan hukum mazhab-mazhab dalam ilmu hukum dan ilmu pembantu dalam ilmu hukum. Arti, tujuan dan fungsi hukum, sumber-sumber hukum. Beberapa konsep dasar (inti) dalam hukum, tentang hak dan kewajiban, penggolongan hukum, penemuan hukum, mazhab-mazhab dalam ilmu hukum beberapa ilmu pembantu bagi ilmu hukum, hukum dan masyarakat.
Pendidikan Agama <i>Islam Study</i>	Mata kuliah ini mempelajari tentang Tuhan Yang Maha Esa, manusia, hukum, moral, iptek dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya dan politik pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
Pendidikan Pancasila <i>Pancasila Education</i>	Mata kuliah ini merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai Pancasila baik dalam tataran nilai maupun aplikasinya dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Pendidikan Kewarganegaraan <i>Civic Education</i>	Mata kuliah ini mempelajari materi yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Bahasa Indonesia <i>Indonesia Language</i>	Mata Kuliah ini mempelajari keterampilan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional secara baik dan benar untuk menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.
Ilmu Negara <i>The State Science</i>	Mata kuliah ini menjelaskan tentang sejarah, pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok tentang negara secara teoritis dan beberapa studi aplikasinya dalam praktik kenegaraan di Indonesia dan dunia.
Hukum Administrasi Negara <i>State Administration Law</i>	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah hukum yang bersifat dasar yang berisi tentang asas, teori dan konsep tentang aktifitas penyelenggaraan pemerintahan (administrasi) negara, serta prosedur tindakan pemerintahan, cara-cara penegakan hukum dalam Hukum Administrasi, perlindungan hukum dalam hubungannya dengan tugas pemerintah.

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
Hukum Tata Negara <i>Constitutional Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari konsep dan teori lanjutan tentang Negara yang mencakup, pengertian HTN, asas-asas HTN, sumber hokum HTN, model dan macam-macam kekuasaan, fungsi kekuasaan kehakiman, HAM dan sejarah ketatanegaraan di Indonesia.
Hukum Perdata <i>Private Law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang berbagai asas-asas dan teori dasar hukum perdata yang terdiri dari hukum orang, hukum benda, hukum perikatan, dan daluwarsa.
Hukum Pidana <i>Criminal Law</i>	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah hukum yang bersifat dasar dalam mengenalkan kepada mahasiswa mengenai asas, teori Hukum Pidana yang terdapat dalam KUHP dan juga konsep-konsep baru dalam Rancangan KUHP.
Hukum Internasional <i>International Law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori, sejarah, sumber hukum, subjek, objek dan asas-asas Hukum Internasional, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional; pengakuan dan yurisdiksi serta tanggung jawab negara dalam hukum internasional serta membahas cabang-cabang ilmu Hukum Internasional dan penerapan teori-teori Hukum Internasional pada tataran prakteknya.
Bahasa Inggris Hukum <i>English for Special Purpose (Law)</i>	Mata Kuliah ini mempelajari kosa kata dan struktur kalimat bahasa inggris dalam bidang hukum untuk membina mahasiswa untuk mampu mengetahui dan memahami bacaan-bacaan hukum dalam Bahasa Inggris, baik berupa <i>descriptive text</i> maupun <i>prescriptive text</i> .
Hukum Konstitusi <i>Constitution Law</i>	Mata kuliah ini adalah hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara yang mempelajari konstitusi sebagai objek material dan hukum dasar sebagai objek formal termasuk undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi dasar hukum tertulis tertinggi dari tata hukum nasional.
Hukum Pemerintahan Daerah <i>Local Government Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari tentang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum Agraria <i>Agrarian Law</i>	Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep pengaturan keagrarian di Indonesia. Indikator atau materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain: pengertian agraria, hukum agraria, tanah dan hukum tanah, ruang lingkup hukum agraria, sejarah hukum agraria di Indonesia, hak penguasaan atas tanah termasuk hak-hak atas tanah, hak ulayat, pendaftaran tanah, pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Reforma agraria serta penyelesaian sengketa agraria.
Hukum Dagang <i>Commercial Law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang segala aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik bentuk badan usaha, cara-cara pendirian dan bagaimana pertanggungjawaban (liabilities) dari pengurus-pengurusnya, sumber hukum dagang, serta perkembangan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan perdagangan di Indonesia
Hukum Islam <i>Islamic Law</i>	Mata kuliah ini menjelaskan alasan Hukum Islam ada dalam Kurikulum Fakultas Hukum, Pengertian Islam, Hukum Islam, Pandangan Islam tentang hubungan agama dan Ilmu Pengetahuan serta Pokok-pokok Ajaran Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Ciri-ciri dan Tujuan Hukum Islam, Sumbersumber Hukum Islam, Kaidah-kaidah Fikih khusus mengenai al ahkam al khamsah, sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam, Hukum Islam di Indonesia, Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Kompilasi Hukum Islam. Kajian Hukum Islam ini selain mencakup pada asas-asas hukum Islam yang berdasarkan pada sumber-sumber hukum Islam dan dijabarkan dalam kitab-kitab dari ahli fikih, substansi perkuliahan hukum Islam ini juga mencakup pembahasan kasus-kasus hukum seperti: hukum perkawinan dan hukum waris, hukum perwakafan, hukum ekonomi syariah penegakannya dalam praktek peradilan agama dan di masyarakat umat Islam umumnya.

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
Antropologi Hukum <i>Anthropology of law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan manfaat Antropologi Hukum, perbedaannya dengan hukum adat dan sosiologi hukum, sejarah perkembangan antropologi hukum, metode penelitian antropologi hukum, tipe budaya hukum, pluralisme hukum, teori-teori antropologi hukum dan penjabarannya, berbagai kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat dan penyelesaiannya, dan fungsi hukum diluar sengketa.
Sosiologi Hukum <i>Sociology of Law</i>	Mata Kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori dan ruang lingkup Sosiologi Hukum, sosial dalam masyarakat dan perubahan perkembangan hukum, pengaruh perubahan sosial dalam masyarakat terhadap perkembangan hukum, hukum sebagai alat rekayasa sosial, strategi penerapan, pengembangan dan pembangunan hukum dalam pluralitas maupun dinamika masyarakat di Indonesia.
Hukum Telematika <i>Telematics law</i>	Mata kuliah ini mengkaji Konsep dan Teori Hukum Telematika untuk (1) mengkritisi Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum telematika yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum telematika, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Telematika dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.
Ilmu Kealaman Dasar <i>Basic of Natural Science</i>	Mata kuliah ini menjadi peletak dasar-dasar IPA sehingga mahasiswa memiliki wawasan yang komprehensif mengenai metode ilmiah dan ilmu pengetahuan secara umum. Materi ini mencakup 1.) Hakikat Ilmu Alamiah Dasar, 2.) Alam Pikiran Manusia dan Perkembangannya, 3.) Kelahiran Alam Semesta, 4.) Alam Semesta sebagai Sistem, 5.) Metode Ilmiah, 6.) Sumberdaya Alam, Lingkungan serta Pengelolaannya, 7.) Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi, Perkembangan, dan Implementasinya
Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Law and Human Rights</i>	Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis konsep, teori dan pengaturan Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional Indonesia serta memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis persoalan aktual dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hukum Keuangan Negara <i>State Financial Law</i>	Mata kuliah ini menjelaskan asas, teori, konsep dan hukum positif tentang Keuangan Negara.
Hukum Pajak <i>Law of Tax</i>	Mata kuliah ini membahas tentang teori perpajakan serta perkembangan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan bidang perpajakan di Indonesia.
Hukum Ketenagakerjaan <i>Labor Law</i>	Mata Kuliah ini mempelajari bidang-bidang hukum ketenagakerjaan, baik sebelum, pada saat, dan sesudah hubungan kerja, yaitu sejarah dan pengantar hubungan perburuhan, Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan industrial, pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja, perselisihan industrial, penyelesaian perselisihan industrial, dan PHK.
Hukum Adat <i>Customary Law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang teori dasar hukum adat, sistem hukum adat, unsur-unsur dan bentuk masyarakat hukum adat, hukum kekeluargaan dan waris adat, pidana adat, serta pengaturan hukum adat secara nasional dan internasional.
Hukum Lingkungan <i>Environment Law</i>	Mata kuliah ini menjelaskan kedudukan Hukum Lingkungan (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur lingkungan hidup agar baik dan sehat dalam mendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Hak Kekayaan Intelektual <i>Intellectual Property Law</i>	Mata Kuliah ini membahas mengenai hak kekayaan intelektual, hak-hak yang melekat di dalam hak kekayaan intelektual, hak cipta dan <i>neighboring right</i> , hak paten, hak merek, rahasia dagang dan informasi dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu,

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
	dan varitas tanaman, pokok-pokok pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual serta kedudukan dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual menurut sudut pandang hukum nasional maupun internasional.
Hukum Perniagaan Internasional <i>International Trade Law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori, subjek, sumber, dan asas/prinsip Hukum Perniagaan Internasional serta membahas praktik-praktik dan perkembangan perniagaan internasional, termasuk keikutsertaan Indonesia dalam perniagaan internasional.
Perancangan Perundang- Undangan <i>Legislation Drafting</i>	Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan teori dan pengaturan perancangan perundang-undangan, jenis-jenis peraturan perundang-undangan dan mempelajari teknik-teknik perancangan perundang-undangan.
Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara <i>Administrative Court</i>	Mata kuliah ini mempelajari mengenai surat kuasa khusus, kuasa isidentil, kuasa intervensi; surat permohonan kuasa isidentil; surat permohonan intervensi; pembuatan surat gugatan; daftar alat bukti surat penggugat; surat jawaban; replik; duplik; pengajuan alat bukti surat tergugat, tergugat intervensi; pembuatan kesimpulan; putusan; penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administrasi dan melalui gugatan.
Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Perdata <i>Judicial Practice and Procedure of Private Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari mengenai teori dasar, asas-asas hukum acara perdata, dasar-dasar hukum Indonesia, konsep-konsep perkembangan hukum acara perdata serta memahami upaya penyelesaian sengketa perkara di bidang hukum perdata melalui jalur litigasi
Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana <i>Judicial Practice and Procedure of Criminal Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum acara pidana berdasarkan KUHAP, asas peradilan pidana, APH dalam sistem peradilan pidana, proses peradilan pidana, proses pembuktian, memahami relasi antar kelembagaan dalam sistem penegakan hukum pidana, upaya hukum dalam peradilan pidana.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi <i>Law of Constitutional Court Procedure</i>	Mata kuliah ini mempelajari mengenai sejarah hukum acara Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak yang berperkara dan legal standing pendaftaran permohonan yaitu permohonan tentang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, permohonan tentang sengketa kewenangan lembaga negara, permohonan tentang pembubaran partai politik, permohonan tentang perselisihan hasil pemilu, permohonan tentang dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden. serta pemeriksaan persidangan Mahkamah Konstitusi yaitu penjadwalan sidang dan pemeriksaan persidangan. pembuktian dan alat-alat bukti yaitu pengertian pembuktian dan alat-alat bukti. putusan Mahkamah Konstitusi yaitu tentang pengertian putusan, putusan Mahkamah Konstitusi dan isi putusan.
Hukum Acara Peradilan Agama <i>Religion Judicial Procedure</i>	Mata kuliah ini mempelajari mengenai Hukum Peradilan Agama sebagai hukum formil dalam menegakkan hukum materiil, khususnya hukum perdata Islam, dan mengajarkan bagaimana mengajukan gugatan/permohonan dalam kasus perceraian, penentuan kompetensi relatif/absolute, kumulasi gugatan, pemeriksaan perkara perceraian, pembiayaan anak, nafkah istri, harta bersama serta prosedur beracara terhadap sengketa ekonomi syariah.
Perancangan Kontrak <i>Contract Drafting</i>	Mata kuliah ini membahas tentang analisis perkembangan hukum kontrak, mengkaji berbagai macam bentuk kontrak dan mempelajari teknik-teknik perancangan atau pembuatan kontrak.
Kewirausahaan <i>Entrepreneurship</i>	Mata kuliah ini merupakan aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Belajar mata kuliah kewirausahaan memotivasi mahasiswa untuk berkontribusi dalam dunia kewirausahaan sebagai wirausahawan muda yang mempunyai wawasan tentang kewirausahaan yang memperkenalkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang bersifat pembaruan (kreasi baru) yang berlangsung terus menerus.

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
<p>Hukum Perlindungan Konsumen <i>Consumer Protection Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Indikator atau materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain pengertian dan latar belakang hukum perlindungan konsumen, asas-asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, peranan hukum dalam perlindungan konsumen, sumber-sumber hukum perlindungan konsumen, masalah hukum berkaitan dengan kedudukan hukum perlindungan konsumen, aspek hukum keperdataan dalam perlindungan konsumen, aspek hukum publik dalam perlindungan konsumen, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, lembaga/instansi dan peranannya dalam perlindungan konsumen, isu-isu hukum perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan.</p>
<p>Hukum Perubahan Iklim <i>Climate Change Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini merupakan isu spesifik yang menjadi perhatian global yang di lihat dari sisi hukum dan kebijakan meskipun bermula dari perspektif global, sasaran pada konsentrasi area dan isu pengelolaan sumber daya alam terutama kehutanan dan kegiatan ekonomi berbasis lahan mempengaruhi orientasi mitigasi risiko perubahan iklim. Pada bagian lain, hukum perubahan mempersiapkan mahasiswa memiliki basis pengetahuan global-nasional-lokal dan kesiapan hukum yang tersedia dalam merespon kebutuhan pelebagaan, kerja sama dan isu perdagangan carbon.</p>
<p>Pengantar Filsafat Hukum <i>Introduction to Philosophy of Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini membahas pemahaman dasar filsafat hukum mulai dari definisi, sejarah perkembangan, metode, tugas dan ruang lingkupnya yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan aliran-aliran pemikiran yang ada dalam filsafat hukum.</p>
<p>Penalaran Hukum <i>Legal Reasoning</i></p>	<p>Mata kuliah ini adalah mata kuliah kemahiran hukum yang salah satunya ditentukan oleh kemampuan penalaran hukum. Kegiatan penalaran hukum dilakukan melalui proses pengidentifikasian isu-isu hukum (subyek-opjek peristiwa, penentuan peristiwa, hubungan hukum, dan kualifikasi hukum), intepretasi, dan konstruksi hukum. Penalaran hukum menggunakan logika dan bahasa sebagai yang membantu memperjelas dan menghindari kesesatan berpikir (<i>fallacy</i>) dalam menyusun kesimpulan pekerjaan teknis hukum.</p>
<p>Metode Penelitian Hukum <i>Methods of Legal Research</i></p>	<p>Mata Kuliah ini berisi gagasan tentang penggambaran ilmu hukum secara metodologis, terutama menemukan hukum dalam teks, praktek, maupun penggabungan antara keduanya yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui tulisan ilmiah.</p>
<p>Kuliah Kerja Nyata (KKN) <i>Community Service Program/ Internship</i></p>	<p>Kegiatan pembelajaran dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa bagi masyarakat secara terstruktur di luar kampus Unmul.</p>
<p>Hukum Kehutanan <i>Forestry Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model pengaturan kehutanan di Indonesia dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang Kehutanan.</p>
<p>Hukum Pertambangan <i>Mining Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis pengaturan Hukum Pertambangan di kawasan Hutan Hujan Tropis (<i>Rain Tropical Forest</i>) dan lingkungannya. Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model penguasaan pertambangan di Indonesia dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang pertambangan baik Migas, dan Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>
<p>Hukum Perlindungan Pesisir dan Laut <i>Coastal and Ocean Protection Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis pengaturan dan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model pengaturan perlindungan pesisir dan laut dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang pesisir dan laut dalam lingkup lokal, nasional dan internasional.</p>

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
Legal Audit <i>Legal Audit</i>	Mata kuliah ini merupakan bagian dari kemahiran hukum melalui kegiatan mengidentifikasi objek audit (lingkup dan cakupan audit), sistematika syarat hukum, ketercukupan dan pengujian secara tuntas (<i>legal due diligence</i>). Hasil legal audit berguna sebagai bahan pertimbangan sebelum keputusan investasi, akuisisi, merger, pengujian atas peristiwa hukum yang telah terjadi baik terhadap peristiwa hukum privat maupun hukum publik. Dokumen yang dihasilkan dari proses legal audit dapat berupa Dokumen legal audit atau dibuat dalam bentuk legal opinion.
Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum <i>Ethic Code and Responsibility of the Legal Profession</i>	Mata kuliah ini akan mempelajari membahas atau menelaah tentang dan sekitar etika dan tanggungjawab profesi hukum. Pertama-tama dijelaskan tentang pengertian dan sekitar etika yang meliputi manusia sebagai makhluk yang berbudaya, pengertian etika dari para sarjana, sifat dan fungsi etika, macam-macam etika, beda etika dengan etiket, tentang dan sekitar moral yang meliputi pengertian moral, pengertian moral dari para sarjana, macam-macam moral serta tanggung jawab dalam profesi hukum.
Skripsi <i>Bachelor Thesis</i>	Karya tulis ilmiah hasil penelitian yang menggambarkan suatu fenomena ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan yang sederhana.
Hukum Perizinan <i>Law of Permit</i>	Mata kuliah ini secara umum menelaah tentang eksistensi perizinan bagi pemerintah dan berbagai macam izin dengan bentuk, isi, sifat-sifat, serta prosedurnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan. Lebih spesifik Hukum Perizinan mengkaji tentang perizinan sebagai instrumen pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum pemerintahan.
Hukum Administrasi Lingkungan <i>Environmental Administration Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari mengenai Hukum Administrasi Lingkungan, Hukum Sumber Daya Alam belum tentu lingkungan tetapi lingkungan bisa jadi Sumber Daya Alam (SDA). Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, Amdal dalam upaya perlindungan hukum, Amdal sebagai instrumen untuk mewujudkan <i>Good Environmental Governance</i> , Amdal, UKL-UPL dan izin lingkungan, mekanisme perijinan lingkungan, perijinan lingkungan, penegakan hukum administrasi hukum lingkungan, gugatan administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
Hukum dan Kebijakan Publik <i>Law and Public Policy</i>	Mata kuliah ini membahas tentang 2 (dua) kerangka dasar yaitu, pembahasan tentang Hukum dan kebijakan Publik dengan merujuk pada prinsip-prinsip penataan Negara yang modern yang berlaku saat ini yang berkisar pada teori-teori <i>Good Governance</i> dan <i>Reint Venting Government</i> , selain itu, perkuliahan ini juga secara spesifik diperkaya dengan pembahasan mengenai konsep Pelayanan Publik dan <i>Good Governance</i> di Indonesia.
Hukum Kewenangan dan Diskresi <i>Authority and Discretion Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari teori dan praktik serta relevansi antara kewenangan dan diskresi dalam sistem ketatanegaraan
Hukum Penataan Ruang <i>Law of Spatial Planning</i>	Mata kuliah ini mempelajari tentang filosofi dan pentingnya penataan ruang, pada bagian lain MK ini menjelaskan tentang pola distribusi penggunaan ruang baik didarat maupun di laut sebagai satu kesatuan perencanaan ruang. Tahapan penataan ruang yang mengikuti pola penetapan ruang secara nasional menjadi bagian dari sistem penataan ruang pada tingkat provinsi/ kabupaten/kota Pola distribusi penataan ruang mencakup alokasi yang seimbang dan adil berbagai aktivitas subyek hukum bahwa area area perlindungan, konservasi dan pencadangan penggunaan ruang pada masa yang akan datang.
Aspek Hukum Kerja Sama Pemerintah	Mata kuliah ini mempelajari tentang Sumber hukum kerja sama pemerintah, KTUN sebagai sumber hukum kerja sama pemerintah, perjanjian kerja sama, karakter hukum kerja sama pemerintah, hukum campuran <i>oplostheori</i> (teori melebur) atau <i>ketentheori</i> (teori rangkaian). kedudukan hukum pemerintah dalam kerja sama dengan

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
<i>Legal Aspect of Government Cooperation</i>	pihak ketiga, instrumen hukum kerja sama pemerintah yaitu mou dan perjanjian. bentuk-bentuk kerja sama pemerintah yaitu bentuk-bentuk kerja sama antar pemerintah, bilateral, multilateral, bentuk-bentuk kerja sama pemerintah dengan swasta. serta kontrak pelayanan, operasi dan perawatan (<i>operation, maintenance and service contract</i>), kontrak bangun, <i>operasikan dan transfer (build, operate and transfer-bot)</i> , <i>joint venture, community based provision</i> . kerja sama pemerintah daerah antara lain: kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, kerja sama antar pemerintah daerah dan kerja sama pemerintah daerah dengan lembaga privat, prosedur kerja sama pemerintah yaitu prosedur kerja sama pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, pengujian diskresi kerja sama pemerintah serta sifat koordinasi eksekutif -legislatif dalam kerja sama pemerintah. juga menjelaskan larangan dalam kerja sama pemerintah, konsep tanggung jawab dalam kerja sama pemerintah, tanggung jawab jabatan dalam kerja sama pemerintah dan pertanggungjawaban hukum dalam kerja sama pemerintah.
Hukum Aparatur Negara <i>State Apparatus Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari tata nilai dalam penyelenggaraan negara, bentuk dan sistem pemerintahan negara, sistim kepemimpinan nasional, visi bangsa dan kompetensi aparatur negara, etika kehidupan berbangsa.
Perbandingan Hukum Administrasi Negara <i>Comparison of State Administration Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari berbagai sistem hukum Administrasi Negara-negara lain di dunia.
Hukum Keimigrasian <i>Imigration Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari konsep, teori keimigrasian, keimigrasian dalam sistem hukum indonesia, politik hukum keimigrasian, ruang lingkup, prinsip, perlindungan warga negara serta pencegahan dan penanganan kasus dalam keimigrasian.
Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kejahatan internasional (<i>international crime</i>) maupun kejahatan yang bersifat transnasional (<i>transnational crime</i>). Mata kuliah ini mencakup empat kejahatan yang secara tradisional dikategorikan sebagai kejahatan internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Adapun pokok bahasan kejahatan transnasional mencakup materi-materi tentang kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan transnasional dan materi serta pengaturan beberapa kejahatan transnasional, yaitu terorisme, pengedaran narkotika, pencucian uang, kejahatan siber, dan perdagangan orang.
Hukum Organisasi Internasional <i>International Organization of Law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang berbagai teori dan konsep dasar hukum organisasi internasional antara lain definisi, subjek, objek, dan sumber hukum organisasi internasional, klasifikasi dan tipologi organisasi internasional, kepribadian hukum dan wewenang organisasi internasional, hak-hak istimewa dan kekebalan organisasi internasional, dan keputusan-keputusan organisasi internasional. Dalam mata kuliah ini juga dipelajari peran Indonesia dalam percaturan organisasi internasional
Hukum Perdata Internasional <i>International Private Law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang Hukum Perdata Internasional serta perkembangannya dalam contoh kasus.
Hukum Perjanjian Internasional <i>International Treaty Law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang berbagai asas-asas, dasar teori, sejarah, subjek, objek, jenis dan bentuk hukum Perjanjian Internasional serta membahas perjanjian internasional pada tataran prakteknya.

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
<p>Hukum Lingkungan Internasional <i>International Environmental Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini mengkaji Teori dan Konsep Hukum Lingkungan Internasional untuk (1) mengkritisi perubahan iklim yang terjadi saat ini; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum lingkungan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum lingkungan internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum lingkungan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Lingkungan Internasional dalam menjawab isu-isu lingkungan internasional.</p>
<p>Hukum Diplomatik dan Konsuler <i>Diplomatic and Counsellor Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini membahas tentang pengaturan hukum dan perkembangan implementasi hubungan diplomatik dan konsuler berbasis Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963, dan Konvensi Wina 1975 disertai dengan pembahasan contoh-contoh faktual.</p>
<p>Hukum Humaniter <i>Humanitarian Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep perang dan konflik bersenjata serta yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag beserta protokol-protokol tambahan yang berlaku pada saat sengketa bersenjata dan kondisi bencana, baik internasional maupun non internasional.</p>
<p>Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional <i>Dispute Settlement of International Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori dasar Hukum Internasional dan Hubungan Internasional serta tipologi dan metode penyelesaian sengketa internasional.</p>
<p>Hukum Kewilayahan Negara <i>State Territorial Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini membahas tentang unsur-unsur kewilayahan yang dimiliki oleh negara dari perspektif kedaulatan dan hak berdaulat yang melekat pada setiap unsur wilayahnya.</p>
<p>Hukum Antar Lembaga Negara <i>State Organs Relationship</i></p>	<p>Mata kuliah ini membahas secara mendalam konsep negara hukum yang menjadi pedoman dalam penempatan dengan jelas prinsip Negara hukum dalam konstitusi, Kemudian teori trias politika dan azas <i>check and balance</i> menjadi awal mula pembagian kekuasaan Negara beserta jalur jalur pembentukan lembaga dilanjutkan dengan Tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Negara beserta Hubungan Hukum dengan Lembaga Negara Lainnya.</p>
<p>Negara hukum dan demokrasi <i>State of law and democracy</i></p>	<p>Mata kuliah ini mempelajari konsep negara, hukum dan sistem demokrasi secara lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan filosofis, historis, politis dan yuridis. Dibicarakan pula mengenai pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum sebagai implikasi dari determinasi hukum atas politik.</p>
<p>Hukum Lembaga Kepresidenan <i>Law of Presidential</i></p>	<p>Mata kuliah ini membahas secara mendalam azas trias politica, konsekuensi prinsip kekuasaan, wewenang eksekutif, fungsi eksekutif, tipe lembaga eksekutif, sistem lembaga eksekutif, hal mempengaruhi kekuasaan eksekutif, jenis eksekutif, azas dalam eksekutif, azas pembentukan lembaga, perkembangan kekuasaan eksekutif di Indonesia, orde lama, baru dan era reformasi, komparasi kewenangan persiden orba vs reformasi.</p>
<p>Hukum Lembaga Perwakilan Rakyat <i>Law of The House of Representative</i></p>	<p>Mata kuliah ini mempelajari tentang hubungan kedaulatan rakyat dengan pembentukan lembaga perwakilan rakyat yang meliputi teori kedaulatan rakyat, teori pemisahan dan pembagian kekuasaan serta kedudukan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; kelembagaan DPR sebelum dan sesudah perubahan UUD Tahun 1945; kelembagaan MPR sebelum dan sesudah perubahan UUD Tahun 1945; kelembagaan DPD; dan lembaga perwakilan rakyat daerah. Pembelajaran dilakukan melalui pertemuan/ceramah; presentasi; dan diskusi. Sementara evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penugasan mandiri, penugasan terstruktur, UTS dan UAS.</p>

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
<p>Hukum Pemerintahan Desa <i>Law of Village Government</i></p>	<p>Mata kuliah ini mempelajari tentang hakekat hukum pemerintahan desa, sejarah desa dan pemerintahan desa, perdebatan desa dalam konstitusi, pengaturan pemerintahan desa dari waktu ke waktu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan desa dan pengujian peraturan desa. Pembelajaran dilakukan melalui pertemuan/ceramah; presentasi; dan diskusi. Sementara evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penugasan mandiri, penugasan terstruktur, UTS dan UAS.</p>
<p>Hukum Pers <i>Journalism Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar Hukum Pers di Indonesia, aspek perkembangan dan pengaturan hukum pers, aspek kesejarahan dan kelembagaan, aspek teortik tentang Pers, aspek kasus yang terjadi dalam dunia pers, serta memahami kepada mahasiswa tentang eksistensi Pers di Era revolusi Industri 4.0.</p>
<p>Hukum Pemilu <i>General Election Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini mempelajari mengenai kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehidupan demokrasi selalu beriringan dengan kehidupan partai politik dan sistem pemilu. Pada bagian awal perkuliahan akan dijelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, perkembangan partai politik serta fungsinya. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan sistem pemilu yang dianut di Indonesia serta beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan partai politik dan pemilu. Melalui mata kuliah ini juga akan disampaikan pengetahuan teoritis tentang Pemilu serta pengetahuan hukum pemilu. Di dalam mata kuliah ini juga akan dikembangkan kemampuan analitis dan kemahiran mahasiswa dalam menganalisis persoalan pemilu dengan teori, prinsip negara hukum dan negara demokrasi, serta hukum positif.</p>
<p>Kekuasaan Kehakiman <i>Judge Authority</i></p>	<p>Mata kuliah ini membahas tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, faktor penegakan hukum, independensi pengadilan Indonesia sebagai negara demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum, sistem hukum dan peradilan. Peradilan umum dan khusus, Komisi Yudisial, Kebijakan asasi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.</p>
<p>Perbandingan Hukum Tata Negara <i>Comparison of Constitutional Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup Perbandingan HTN, metode dan tujuan perbandingan HTN, faktor yang mempengaruhi ketatanegaraan dan bermacam bentuk ketatanegaraan di dunia, perbandingan konstitusi dalam ketatanegaraan dari masa klasik sampai masa modern, ketatanegaraan dalam berbagai sistem pemerintahan, dan perbandingan HTN beberapa negara Asia Tenggara serta dunia.</p>
<p>Hukum Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan <i>Banking and Monetary Institutional Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini membahas mengenai perbankan dan lembaga jasa keuangan serta perkembangannya di Indonesia, termasuk didalamnya adalah perkembangan perbankan konvensional dan syariah. Lembaga jasa keuangan yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup pada pengaturan, macam, fungsi, ruang lingkup, dan Otoritas Jasa Keuangan serta keterkaitan di antara lembaga jasa keuangan tersebut.</p>
<p>Hukum Jaminan dan Penyelesaian Hutang <i>Security and Debt Settlement Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan teori hukum jaminan, penggolongan dan jenis-jenis benda yang dapat dijadikan jaminan, ruang lingkup jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek kapal laut dan hipotek pesawat udara, jaminan perorangan, bank garansi, <i>surety bond</i>, Resi Gudang <i>Privilege</i> dan hak retens.</p>
<p>Hukum Perusahaan <i>Corporate Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini mengajarkan untuk mendalami pemahaman mengenai hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia dengan perkembangannya terutama menguraikan mengenai jenis-jenis badan usaha dan selukbeluknya.</p>
<p>Hukum Perjanjian dan Perkembangan Kontrak Komersial</p>	<p>Mata kuliah ini mempelajari tentang sistematika Buku III KUHPerdara, asas-asas dan unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, lahirnya perjanjian, macam-macam perikatan, pelaksanaan dan akibat perjanjian, wanprestasi dan risiko, cara penafsiran perjanjian, cara hapusnya perikatan,</p>

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
<i>Contract Law and Commercial Contract Development</i>	perikatan yang lahir dari undang-undang serta dipengaruhi oleh perkembangan Kontrak Komersial.
Hukum Ekonomi Syariah <i>Sharia Economic Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan konsep ekonomi syariah dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, surat-surat berharga syariah (saham, obligasi dan reksadana syariah), penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan lain-lain sebagaimana tersebut dalam UU No, 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2010.
Hukum Investasi dan Pasar Modal <i>Investment and Capital Market Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari pengertian investasi dan dasar hukum investasi, dasar hukum dan asas-asas investasi, jenis jenis dan bidang usaha menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 2007, investasi dan penanaman modal baik itu asing dan dalam negeri.
Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha <i>Anti-Trust Law</i>	Mata Kuliah ini mempelajari tentang sejarah, dan asas-asas hukum persaingan usaha, teori pelaksanaan persaingan usaha di Indonesia. mempelajari dan menganalisis mengenai sengketa hukum perdata yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya dan kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Hukum Asuransi <i>Insurance Law</i>	Mata kuliah ini membahas pengetahuan dasar tentang asuransi serta perkembangan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan asuransi di Indonesia.
Hukum Keperdataan Adat <i>Customary Civil Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari tentang lingkup keperdataan yang berkaitan dengan masyarakat adat, yang mencakup tentang pembahasan hukum adat yang lebih menitikberatkan kepada aspek keperdataan dari masyarakat adat. Membahas tentang perkawinan dalam masyarakat adat, pewarisan dalam masyarakat adat, hukum perikatan, hukum jaminan keperdataan adat, dan lain sebagainya.
Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari kejahatan internasional (<i>international crime</i>) maupun kejahatan yang bersifat transnasional (<i>transnational crime</i>). Mata kuliah ini mencakup empat kejahatan yang secara tradisional dikategorikan sebagai kejahatan internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Adapun pokok bahasan kejahatan transnasional mencakup materi-materi tentang kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan transnasional dan materi serta pengaturan beberapa kejahatan transnasional, yaitu terorisme, pengedaran narkotika, pencucian uang, kejahatan siber, dan perdagangan orang.
Kriminologi <i>Criminology</i>	Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang faktor penyebab kejahatan, pelaku kejahatan, tipe dan karakteristik kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dan upaya penanggulangan kejahatan.
Sistem Peradilan Pidana <i>Criminal Justice System</i>	Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum acara pidana berdasarkan KUHAP, asas peradilan pidana, APH dalam sistem peradilan pidana, proses peradilan pidana, proses pembuktian, memahami relasi antar kelembagaan dalam sistem penegakan hukum pidana, upaya hukum dalam peradilan pidana. Membantu mahasiswa untuk memahami proses peradilan pidana dalam KUHAP dan mempraktekkan ilmu peradilan pidana.
Tindak Pidana Di Luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana <i>Crime Outside the Criminal Code</i>	Mata kuliah ini mempelajari atas tindak pidana yang belum diatur dalam KUHP sehingga melahirkan aturan di luar KUHP secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan zaman.
Kejahatan Sumber Daya Alam <i>Natural Resource Crime</i>	Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian kejahatan SDA dari berbagai perspektif, urgensi pengaturan kejahatan SDA, bentuk dan jenis peraturan terkait kejahatan SDA, bentuk-bentuk kejahatan SDA dan cara menanggulangi Kejahatan SDA

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
Tindak Pidana Korupsi <i>Corruption Crime</i>	Mata kuliah ini mempelajari tindak pidana korupsi dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti korupsi di masyarakat.
Hukum Pidana Anak <i>Juvenile Criminal Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari hukum pidana anak sebagai asset generasi bangsa baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban serta dengan tujuan menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
Kejahatan Korporasi <i>Corporate Crime</i>	Mata kuliah ini mengkaji tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui teori <i>strict liability</i> dan <i>vicarious liability</i> , juga tipe kejahatan yang dilakuakn korporasi.
Viktimologi <i>Victimology</i>	Mata kuliah ini membahas kedudukan korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan dan kedudukannya di dalam hukum, reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan serta perlindungan dan hak-hak korban kejahatan. Dan juga mata kuliah mempelajari tentang pengertian viktimologi, sejarah viktimologi, pembagian viktimologi dan hubungan antara viktimologi dengan ilmu lainnya.
Sistem Penyelesaian Sengketa Berbasis Hukum Adat <i>Customary Law-Based Dispute Resolution System</i>	Mata kuliah ini mempelajari mengenai berbagai jenis sengketa di masyarakat adat berikut dengan metode penyelesaian sengketanya.
Sistem Peradilan Tipikor <i>Corruption Court System</i>	Mata kuliah ini mempelajari lebih mendalam tentang bekerjanya hukum pidana materiil yang ditegakkan oleh hukum acara pidana dalam suatu sistem peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sedangkan sistem peradilan Tipikor sendiri merupakan salah satu bagian dari peradilan pidana, dan peradilan pidana merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan umum di Indonesia. Materinya meliputi : pengertian sistem peradilan pidana dan tipikor di Indonesia, perbandingan beberapa model peradilan tipikor, sistem peradilan pidana di Indonesia, proses peradilan tipikor dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Alternatif Penyelesaian Sengketa <i>Alternative Dispute Resolution</i>	Mata kuliah ini membahas tentang berbagai teori dasar, jenis dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara nasional dan internasional.
Sistem Peradilan militer <i>Military Justice System</i>	Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar atau teori-teori administrasi peradilan dan pratik peradilan militer, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.
Sistem Peradilan Pajak <i>Tax Justice System</i>	Mata kuliah ini mendeskripsikan sistem perpajakan Indonesia mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Bea Materai, dan Peradilan Pajak mempelajari dasar-dasar atau teori-teori administrasi peradilan dan praktik peradilan pajak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.
Sistem Peradilan Quasi Judisial <i>Quasi Judicial Justice System</i>	Mata kuliah ini membahas kedudukan Lembaga Quasi Judisial, seperti: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komnas HAM, dan lain-lain dalam Sistem Ketatanegaraan dan Sistem Kehakiman.
Sistem Peradilan Perikanan dan Pelayaran <i>Fisheries and Maritime Justice System</i>	Mata kuliah ini membahas mengenai hukum acara, praktik dan eksistensi peradilan perikanan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan.

Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
Sistem Peradilan Niaga dan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual <i>Bankruptcy and Intellectual Property Rights Justice System</i>	Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam bidang perdagangan ataupun bisnis baik nasional maupun internasional, yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Non litigasi salah satunya dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, dan melalui litigasi dapat dilakukan melalui gugatan pada pengadilan niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum perdata.
Sistem Peradilan Hubungan Industrial <i>Industrial Relations Justice System</i>	Mata kuliah ini mempelajari penyelesaian sengketa hubungan industrial, hubungan industrial, serikat pekerja/serikat buruh, lembaga kerja sama tripartit dan bipartit, pemutusan hubungan kerja, cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui peradilan.

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Ttd.

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024